

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan tonggak penting dalam kemajuan peradaban manusia. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan dijamin oleh negara. Sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 ayat (1), menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Berdasarkan pasal tersebut, setiap anak berkewarganegaraan negara Indonesia berhak dan wajib dalam menjalankan dan mendapatkan pendidikan dasar tanpa terkecuali. Pendidikan adalah wilayah yang menjunjung prinsip keadilan, bisa dimasuki siapa saja tanpa memandang identitas; karena pendidikan bersifat obyektif (Wibowo, 2019). Untuk menjamin semua anak dapat merasakan pendidikan dasar layaknya siswa-siswi pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia menjalankan pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikannya.

Praktik pendidikan inklusif di dunia telah menjadi agenda internasional di antaranya melalui SDGs yang mengamanatkan agar semua anak tanpa keculi dipenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, serta telah menjadi agenda utama dalam pendidikan untuk semua di satuan pendidikan reguler (Farah, 2022). Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi memerlukan penyesuaian dan fleksibilitas di berbagai bidang, baik bidang

pendidikan, pengajaran, sosial, perilaku maupun budaya (Mariani dan Suteng, 2018). Pelaksanaan pendidikan inklusif diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan karena adanya gangguan pada mental, emosi, kognitif, ataupun fisik yang memerlukan penanganan yang khusus dengan adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dimiliki oleh anak (Layyinah, 2023).

Kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 bahwasanya pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (DepDikNas, 2003).

Lebih lanjut pendidikan khusus ini dibahas dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang diubah menjadi pendidikan inklusif. Dijelaskan dalam pasal 1 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus sebelumnya dikhususkan bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus (Darma and Rusyidi,

2015). Pendidikan inklusif hadir sebagai pemecah tembok pembatas antara pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa.

Berdasarkan sarasannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Mewujudkan pendidikan inklusif diperlukan adanya perubahan paradigma pendidikan, dari paradigma pendidikan konvensional ke paradigma pendidikan inklusif (Rahman, 2023). Inklusi diperlukan agar terjadi pemerataan pendidikan dengan memperpendek akses pendidikan ke pendidikan khusus dan memenuhi hak pendidikan anak. Hal ini dapat membantu siswa dengan pemenuhan pendidikan yang berkualitas, membantu mengoptimalkan potensi mereka sehingga dapat berkontribusi terhadap komunitas dan masyarakat (Lukitasari, 2017).

Jenis disabilitas yang diterima di sekolah inklusi dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok yaitu;

- 1) Peserta didik dengan hambatan penglihatan/ Tunanetra,
- 2) Peserta didik dengan hambatan pendengaran/ Tunarungu,
- 3) Peserta didik dengan hambatan intelektual/ Tunagrahita,
- 4) Peserta didik dengan hambatan fisik motorik/ Tunadaksa,
- 5) Peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku,

- 6) Peserta didik lamban belajar,
- 7) Peserta didik berkesulitan belajar spesifik,
- 8) Peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa,
- 9) Peserta didik autistic spectrum disorders (ASD), dan
- 10) Peserta didik attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Diantara kelompok disabilitas tersebut, terdapat siswa yang memiliki dua atau lebih disabilitas diatas yang dikelompokkan sebagai peserta didik dengan hambatan majemuk/Tunaganda (Farah, 2022).

Pelaksanaan pendidikan inklusi menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 4 dan 6 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, Tugas dari pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dimulai dari membuat peraturan daerah mengenai pendidikan inklusi, menetapkan sekolah pelaksana pendidikan inklusi, menyelenggarakan pelatihan untuk guru, membangun infrastruktur untuk menunjang pendidikan inklusi, hingga membiayai sepenuhnya program pendidikan inklusi di setiap sekolah. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal tersebut bahwasanya setiap kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik.

Salah satu kota di Indonesia yang telah menjalankan sistem pendidikan inklusi dan terus berlanjut hingga saat ini ialah Kota Padang. Kebijakan pendidikan inklusi di Kota Padang dijalankan dengan acuan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Pemerintah Kota Padang membentuk Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan inklusi. Menurut data dari LDPI pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah keseluruhan sekolah inklusi dari tingkat TK hingga SMP adalah 338 sekolah dengan total keseluruhan siswa disabilitasnya berjumlah 1460 siswa. Dari jumlah siswa tersebut, 17,6% dari keseluruhan siswa atau 257 diantaranya merupakan siswa SMP.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua LDPI, Yovi Krislova, tingkat SMP merupakan tingkat sekolah di Kota Padang yang bagus perkembangannya menjalankan pendidikan inklusi. Penilaian ini dinilai dari banyaknya siswa berkebutuhan khusus di tingkat SMP yang melakukan assesmen di LDPI. Berdasarkan data penerimaan siswa inklusi tahun ajaran 2023/2024, SMP Negeri 14 menjadi sekolah inklusi tingkat SMP yang menerima siswa terbanyak dengan persentase 11,67% dari total keseluruhan siswa SMP Inklusi yang ada di Kota Padang.

Anak berkebutuhan khusus dan sekolah-sekolah di Kota Padang mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas diberikan advokasi, pembinaan, pengembangan, penelitian dan melaksanakan Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota

Padang disesuaikan dengan aturan pada Panduan Pendidikan Inklusi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Dalam Panduan Pendidikan Inklusi (2022), pelaksanaan pendidikan inklusi dilaksanakan dengan prinsip utama bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya.

Pemenuhan prinsip pendidikan inklusi tersebut harus disertai dengan kerjasama yang baik antar pihak yang berkaitan sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran proses belajar-mengajar siswa dan siswa berkebutuhan khusus. Sesuai dengan prinsipnya, Semua peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Alur pelaksanaan pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus dalam panduan pelaksanaan pendidikan inklusi adalah dimulai dari jalur masuk siswa baru (PPDB), Asesmen dan identifikasi profil anak berkebutuhan khusus, membuat perencanaan belajar anak hingga pembuatan laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus diakhir semester.

Salah satu SMP inklusi di Kota Padang yang memberlakukan pendidikan inklusi sebagai sistem pendidikannya ialah SMP Negeri 14 Padang. Pada tahun ajaran 2023/2024 SMP Negeri 14 Padang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus sebanyak 30 siswa dari 727 total keseluruhan siswa. Dari keseluruhan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 14 Padang ada yang mendaftar lewat jalur inklusi sedari awal. Namun untuk beberapa siswa berkebutuhan khusus baru diketahui memiliki kebutuhan khusus saat sudah melalui proses belajar mengajar. Dari keseluruhan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 14 Padang, keseluruhan siswa merupakan disabilitas sulit belajar.

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, siswa sulit belajar adalah seseorang yang mengalami kesulitan belajar dan setelah diukur dengan menggunakan tes kecerdasan menghasilkan skor IQ rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi memperlihatkan hasil belajar (pada bidang tertentu) berada jauh di bawah perkembangan usia dan kemampuan mentalnya. Dalam proses akademik, Mereka dapat mengikuti kurikulum standar, tetapi harus dengan penyesuaian (kurikulum adaptasi).

Proses pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Padang masih banyak terdapat kekurangan. Tenaga pendidik di SMP Negeri 14 Padang belum memenuhi syarat untuk menunjang proses belajar-mengajar anak disabilitas karena tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus. Dari total siswa berkebutuhan khusus yang ada, tidak terdapat Guru Pendamping Khusus dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus selama proses belajar dan hanya mengandalkan Guru Mata Pelajaran untuk membimbing sekaligus mengajar anak berkebutuhan khusus. Latar belakang guru yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu dari lulusan pendidikan luar biasa akan menjadi beban kerja yang berat bagi guru itu sendiri (Maghfiroh dkk, 2022).

Sesuai dengan standar pendidikan inklusi, untuk memenuhi komponen tenaga pendidik sekolah inklusi harus memiliki minimal terdiri dari tiga orang tenaga pendidik, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus di setiap kelas yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Mudjito, dkk (2012) mengemukakan bahwa guru pendamping khusus adalah guru untuk

mendidik siswa berkebutuhan khusus, dan untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus, tugas dari guru pendamping khusus adalah:

- a. Menyusun instrumen penilaian pendidikan khusus,
- b. Melaksanakan pendampingan untuk pendidikan kebutuhan khusus,
- c. Memberikan bantuan layanan khusus,
- d. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk siswa berkebutuhan khusus,
- e. Memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus.

Tidak adanya Guru Pendamping Khusus di SMP Negeri 14 memberikan kendala bagi guru yang mengajar di kelas yang memiliki siswa di dalamnya. Proses belajar-mengajar siswa berkebutuhan khusus dan guru di sekolah menjadi tidak efektif dan menghasilkan *output* yang kurang maksimal bagi siswa disabilitas. Berdasarkan jenis disabilitas siswa yang ada di SMP Negeri 14 Padang, siswa dengan disabilitas sulit belajar memerlukan Guru Pendamping Khusus untuk memberikan pendampingan khusus saat proses belajar.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Padang masih belum terpenuhi. Hal ini tampak pada belum adanya bangunan inklusi seperti ruang assesmen, toilet khusus disabilitas hingga akses jalan yang belum aksesibel untuk beberapa jenis disabilitas. Kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana ini membuat lingkungan sekitar di SMP Negeri 14 Padang juga belum memperhatikan hak-hak siswa berkebutuhan khusus.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kendala-kendala yang dihadapi SMP Negeri 14 Padang memberikan dampak pada terkendalanya pelaksanaan implementasi pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 14. Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus terutama siswa disabilitas sulit belajar di SMP Negeri 14 menjadi tidak terpenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Padang banyak mengalami kendala terutama dalam pemenuhan guru pendamping khusus, tersedianya sarana dan prasarana yang aksesibel, dan lingkungan yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dan peneliti menarik rumusan masalah yaitu **Apa penyebab dari kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi disabilitas sulit belajar di SMP Negeri 14 Padang?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan penyebab dari kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Padang.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab SMP Negeri 14 Padang terkendala dalam melaksanakan pendidikan inklusi untuk anak disabilitas sulit belajar.
2. Mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian yang akan diangkat, bermanfaat menghasilkan khazanah keilmuan terkait pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Padang dan evaluasi untuk hambatan yang dihadapi sekolah-sekolah inklusi. Semua elemen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan inklusi mulai dari orangtua murid, guru, hingga pemerintah ikut memiliki kontribusi dalam keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah dan diharapkan menjadi referensi untuk peneliti lainnya yang membahas tentang analisis sosiologi pendidikan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi pembaca yang memiliki ketertarikan dalam pembahasan mengenai pendidikan inklusi.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Pendidikan Inklusif

Pendidikan adalah hak asasi setiap individu, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan inklusi

dalam pendidikan telah menjadi semakin penting dan diperjuangkan di banyak negara (Mustika dkk, 2023). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga negaranya yang tertuang dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” turut menerapkan pendidikan inklusi sebagai bentuk sistem pelaksanaan pendidikan.

Pendidikan inklusi adalah pendekatan di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik itu kebutuhan fisik, intelektual, atau emosional, diajak untuk belajar dalam lingkungan yang sama dengan teman sebaya mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Ini berarti bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus akan menerima dukungan yang diperlukan untuk berhasil belajar, sambil tetap berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari bersama teman-teman sebayanya (Mustika dkk, 2023).

Pendidikan inklusif dipedomani melalui *government policy* yang berdasarkan tulisan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Tri, 2023). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus diatur pada Bab IV Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak

untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat istimewa pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Farah, 2022).

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kota Padang menjalankan pendidikan inklusi dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang No 19 Tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA di Kota Padang melaksanakan pendidikan inklusi dibawah koordinator UPTD LDPI Kota Padang dan menggunakan panduan pelaksanaan pendidikan inklusi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud.

### **1.5.2 Prinsip Pendidikan Inklusif**

Menurut *Buku Panduan Pendidikan Inklusif (2022)* prinsip dalam menjalankan pendidikan inklusif adalah semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya.

Proses adaptasi pendidikan inklusif meliputi tiga aspek yang harus disesuaikan yaitu kurikulum, instruksional, dan lingkungan belajar (ekologis).

1. **Proses adaptasi kurikulum** adalah terkait dengan penyesuaian konten/isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari oleh peserta didik. Pada adaptasi kurikulum guru dapat melakukan penambahan keterampilan untuk mengganti agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan atau mengganti dengan kompetensi lain yang setara. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai. Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Dalam proses adaptasi kurikulum satuan pendidikan harus:

- 1) fleksibel dan inovatif;
- 2) memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif;
- 3) membuat penyesuaian kurikulum, membuat perencanaan untuk seluruh kelas, menetapkan tujuan pengajaran yang terbuka dan jelas, menggunakan alternatif metode pengajaran, menggunakan teknologi yang tepat, dan membuat persiapan terlebih dahulu;
- 4) memastikan kemudahan lingkungan fisik dan mengembangkan lingkungan satuan pendidikan yang mendukung; dan
- 5) mengembangkan kerja sama dengan bekerja bersama dalam tim.

2 **Proses Adaptasi pembelajaran/instruksional** adalah terkait dengan cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Dalam hal ini guru diberikan

keleluasaan dalam melakukan penyesuaian proses pembelajaran di kelas yang beragam dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.

- 3 **Adaptasi lingkungan belajar** berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran (dimana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran dilakukan) termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

### 1.5.3 Sistem Pendidikan Inklusif di SMP Negeri

Salah satu nilai yang disosialisasikan sekolah kepada peserta didik adalah universalisme, yaitu perlakuan yang sama pada setiap orang (Damsar, 2011). Perbedaan pada ABK dengan peserta didik normal menjadi perhatian utama dalam menjalankan pendidikan inklusi. Tingkat toleransi peserta didik tergantung bagaimana penerimaan nilai-nilai yang disosialisasikan oleh sekolah bisa diadaptasi oleh peserta didik.

Peran guru dalam membentuk perencanaan pembelajaran menjadi hal penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memiliki kemauan, kemampuan, dan kesiapan dalam merespon perbedaan atau keberagaman serta memahami keberadaan masing-masing siswanya salah satunya kompetensi seorang guru (Gallan and Azwandi, 2013)

Guru memiliki pedoman pada kurikulum dalam proses belajar-mengajar dikelas. Pada tingkat SMP, kurikulum yang digunakan sesuai dengan arahan

pemerintah adalah kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Poin-poin yang ditekankan pada kurikulum tersebut memiliki kemiripan, yaitu bagaimana kreativitas guru dalam proses mengajar dan tidak terpaku pada buku teks. Untuk ABK, sekolah inklusi akan menyesuaikan kurikulum yang digunakan sesuai dengan karakteristik disabilitas ABK. Penyesuaian kurikulum ini dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama dengan GPK. Disini peran guru untuk membentuk strategi bagaimana peserta didik dapat menguasai materi dan kompetensi di kelas tanpa ada rasa pengecualian dengan peserta didik normal. Pembentukan karakter untuk peserta didik normal terhadap ABK pun menjadi peran krusial yang menjadi peran guru dalam adaptasi lingkungan belajar.

#### 1.5.4 Tinjauan Sosiologis

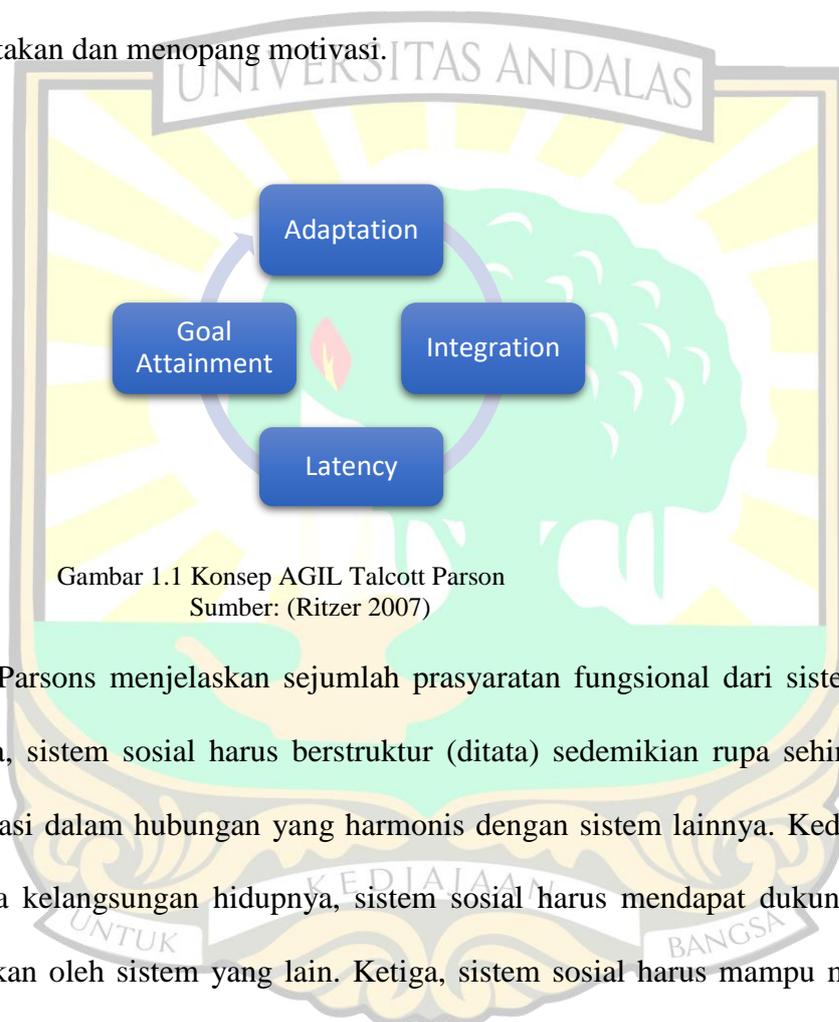
Parsons mengemukakan skema empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang dikenal dengan skema AGIL. AGIL merupakan kumpulan dari empat fungsi yaitu A (*adaptation*), G (*Goal Attainment*), I (*Integration*), dan L (*Latency*). Agar tetap berjalan, sebuah sistem harus memiliki empat fungsi tersebut. Adapun penjelasan dari fungsi tersebut adalah:

**Adaptation** (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

**Goal Attainment** (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

**Integration** (integrasi): suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).

**Latency** (pemeliharaan Pola): sebuah sistem harus melengkapi memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun polapola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.



Gambar 1.1 Konsep AGIL Talcott Parson  
Sumber: (Ritzer 2007)

Parsons menjelaskan sejumlah prasyarat fungsional dari sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus berstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan oleh sistem yang lain. Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proposisi yang signifikan. Keempat, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Kelima, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Keenam, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus dikendalikan. Ketujuh, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.

Dalam menganalisis sistem sosial, Parsons sama sekali tidak mengabaikan masalah hubungan antara aktor dan struktur sosial. Ia menganggap integrasi pola nilai dan kecenderungan kebutuhan sebagai “dalil dinamis fundamental sosiologi”. Menurutnya persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Parson tertarik dengan cara mengalihkan norma dan nilai sistem sosial itu. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu di internalisasikan (internalized); artinya norma dan nilai itu menjadi bagian dari “kesadaran” aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka sendiri itu, aktor sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. Seperti dinyatakan Parsons, “kombinasi pola orientasi nilai yang diperoleh (oleh aktor dalam sosialisasi), pada tingkat yang sangat penting, harus menjadi fungsi dari struktur peran an fundamental dan nilai dominan sistem sosial.

Teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons ini jika dikaitkan dengan penelitian ini bahwa program pendidikan inklusi di SMP N 14 Padang mempunyai sistem dalam pelaksanaannya. Parson tertarik cara mengalihkan norma dan nilai sistem sosial kepada aktor didalam sistem sosial itu. Aktor dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP N 14 Padang adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Kota Padang, Kepala Sekolah dan guru SMP N 14 Padang yang mana aktor dari sistem sosial tersebut harus mengabdikan kepada kepentingan sistem, dan kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini adalah memberikan pendampingan dan kesempatan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

(PDBK) sesuai dengan tujuan sistem yaitu untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Didalam teori fungsionalisme struktural Parsons menjelaskan empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem, yang pertama adalah adaptasi, yaitu bagaimana sistem dalam pendidikan inklusi SMP N 14 Padang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya PDBK. Kedua, pencapaian tujuan dalam pendidikan inklusi SMP N 14 Padang mempunyai tujuan utama untuk memberikan pendampingan dan kesempatan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang bersekolah di sekolah tersebut. Ketiga, Integrasi yaitu dalam pelaksanaan pendidikan inklusi harus mengatur hubungan antara bagian-bagian yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP N 14 Padang. Keempat, adalah pemeliharaan pola yaitu sebuah sistem harus melengkapi dan memelihara dan memperbaiki baik pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Disini peran masyarakat sekitar sekolah dan siswa sebagai teman sebaya menjaga sistem pendidikan inklusi untuk keberlangsungan sistem.

#### **1.5.5 Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penulisan penelitian ini. Beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan rujukan sesuai dengan topik penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

**Pertama**, penelitian mengenai (Juwita and Iswari 2021) “Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 23 Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan serta mendeskripsikan bagaimana implementasi

pendidikan inklusif di SMP Negeri 23 Padang. Adapun hasil dalam penelitian ini memuat bagaimana SMP negeri 23 Padang sudah melakukan upaya signifikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti modifikasi kurikulum yang belum maksimal dan peningkatan fasilitas.

**Kedua**, Penelitian yang menjadi referensi relevan adalah dari (Nur Maghfiroh et al. 2022) yang berjudul “Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di Indonesia, dengan fokus pada persepsi guru mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi. Hasil penelitian ini menemukan beberapa poin yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam hal kesiapan guru, dukungan fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Dalam penerapannya, diperlukan peningkatan pelatihan untuk guru, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta upaya sosialisasi yang lebih luas oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusi.

**Terakhir** penelitian dari (Mariani and Suteng 2018) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi Di SMP Negeri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusi di sebuah SMP Negeri di Salatiga dengan menggunakan model evaluasi kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa program pendidikan inklusi di sekolah yang diteliti masih mengalami berbagai

kesenjangan, terutama dalam hal asesmen, kurikulum, dan dukungan bagi ABK. Dalam penerapannya, diperlukan peningkatan dalam pelatihan guru, modifikasi kurikulum, dan pengadaan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung pendidikan inklusi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun tujuan peneliti memilih pendekatan kualitatif agar dapat mencari dan mengumpulkan data yang didapat untuk dianalisis tanpa melakukan penghitungan data. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (tulisan maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang sudah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2016).

Disini peneliti berusaha menemukan jawaban atas penelitian ini dengan menggali lebih dalam fakta-fakta yang ditemukan dengan cara-cara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai studi proses dan makna lebih humanis tidak hanya melihat tindakan dari luar, tetapi mencoba memahami dunia dari perspektif individu. Tipe penelitian deskriptif disini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti. Kemudian, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan perbuatan manusia dianalisis. Penelitian ini mencoba untuk melihat apa saja penyebab dibalik kendala implementasi pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Kota Padang.

### 1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2016:132). Lebih lanjut Afrizal (2014: 139) membagi jenis informan menjadi dua kategori, yaitu:

2. Informan Pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai informan pelaku adalah Tenaga pendidik dan Staff di SMP N 14 Padang.
3. Informan Pengamat yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti yang bisa juga disebut dengan saksi atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pengamat ialah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara memilih informan yang sesuai dan memenuhi kriteria penelitian. Dalam (Afrizal, 2016) *purposive* adalah mekanisme untuk menentukan informan dengan cara sengaja sebelum penelitian dilakukan dengan membuat dan menetapkan kriteria-kriteria tertentu terlebih dahulu. Kriteria disini berfungsi untuk memudahkan peneliti untuk menentukan informan agar data yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan pelaku yang peneliti tetapkan yaitu:

1. Kepala dan Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 14 Padang

2. Guru Wali Kelas SMP Negeri 14 Kota Padang
3. Guru Mata Pelajaran SMP Negeri 14 Kota Padang

Untuk kriteria Informan Pengamat, peneliti menetapkan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 14 Kota Padang.

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Status	Kategori Informan
1.	Irmanetti, S.Pd	Perempuan	Wakepsek Bid Kesiswaan	Informan Pelaku
2.	Noni Fariago Merrie, S.Pd	Perempuan	Wakepsek Bid Kurikulum	Informan Pelaku
3.	Sri Maningsih, S.Pd	Perempuan	Guru BK	Informan Pelaku
4.	Nulin Febriani, S.Pd	Perempuan	Guru Bersertifikat GPK/ Guru Bahasa Indonesia	Informan Pelaku
5.	Irfan Hanif, S.Pd	Laki-Laki	Guru Olahraga	Informan Pelaku
6.	Marlinawati, S.Pd	Perempuan	Guru Matematika	Informan Pelaku
7.	Fatria Darwis	Perempuan	Guru IPS	Informan Pelaku
8.	Nyndy Afrizal Rasya Putri	Perempuan	Siswa Berkebutuhan Khusus	Informan Pengamat
9.	Tika Novita Sari	Perempuan	Siswa Berkebutuhan Khusus	Informan Pengamat
10.	Aidil Saputra Ramadhan	Laki-Laki	Siswa Berkebutuhan Khusus	Informan Pengamat

Sumber: Data Primer tahun 2024

### 1.6.3 Data yang Diambil

Metode penelitian kualitatif dikatakan sebagai sebuah metode penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka (Afrizal 2016:17). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yakni:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang ditemukan serta diberikan dan didapatkan secara langsung kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer dapat berupa wawancara mendalam dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendapatkan data primer berupa informasi-informasi mengenai kendala-kendala SMP Negeri 14 Padang dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak ditemukan secara langsung serta tidak diberikan langsung kepada pengumpul data atau peneliti. Data sekunder dapat berupa informasi dalam literatur seperti jurnal, *data base*, laporan pemerintah, foto, data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, sumber informasi, maupun informasi yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang peneliti gunakan mulai dari sumber berita-berita pada website portal berita dan studi kepustakaan atau *literature review* yang didapatkan dengan membaca jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Berikut data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Sekolah Reguler Yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2023/2024
- 2) Data Siswa Inklusi SMP Negeri 14 Tahun Ajaran 2023/2024
- 3) Data Peserta Didik Baru Jalur Inklusi Tahun 2024/2025
- 4) Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat SMP

5) Media dan artikel online

#### **1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau interpretasi atau makna-makna dan kejadian-kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun kelompok sosial (Afrizal, 2016). Oleh karena itu, teknik yang peneliti gunakan sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi menurut Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2017), adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan observasi, peneliti menggunakan seluruh panca indra untuk memahami situasi yang sedang terjadi di kehidupan sosial untuk dijadikan data. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sanafiah Faisal (1990) dalam (Sugiyono, 2017:106-107), jenis-jenis observasi dapat diklasifikasikan menjadi observasi partisipatif, observasi terang terangan dan tersamar, dan observasi tak terstruktur.

Proses peneliti mendapatkan data untuk penelitian adalah dengan menggunakan observasi partisipatif. Observasi partisipatif terbagi menjadi empat jenis, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, partisipasi lengkap. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif dengan cara datang dan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Padang.

Observasi pertama dilakukan pada 31 Juli 2024, peneliti mengamati anak berkebutuhan khusus sulit belajar bernama Nyndy yang berada di kelas 9.7. Nyndy

pada jam 10.30 WIB belajar pelajaran Matematika dan duduk di barisan depan sejajar dengan papan tulis. Selama jam pelajaran Nyndy cenderung pendiam dan lebih aktif berbicara dan bertanya dengan teman sebelahnya. Guru yang mengajar Nyndy dikelas tidak terlalu mengamati proses belajar Nyndy. Selama proses belajar, guru dikelas mengajar dengan metode menjelaskan langsung melalui papan tulis.

Dilanjutkan observasi kedua pada tanggal 1 Agustus 2024, peneliti melanjutkan observasi terhadap dua siswi berkebutuhan khusus sulit belajar yaitu Nyndy dan Tika. Pada jam 08.00 WIB, Nyndy dalam jam pelajaran olahraga yang dilakukan di luar kelas. Disini peneliti melihat bagaimana Nyndy berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Permainan lapangan yang diarahkan guru olahraga yang dilakukan oleh siswa kelas 9.7 adalah bola voli dan basket. Nyndy bersama teman-teman sekelasnya yang semuanya siswi perempuan berjumlah 3-5 orang memilih untuk duduk didepan kelas sambil bercengkrama dan makan jajanan kantin. Setelah itu, pada jam 09.00 WIB, peneliti mengobservasi kegiatan siswi berkebutuhan khusus bernama Tika di kelas 8.5. Pada saat itu kelas 8.5 belajar pelajaran Bahasa Inggris dan Tika duduk di baris kedua yang mengarah langsung di tengah papan tulis. Selama pelajaran, Tika cenderung pasif dan tidak banyak bertanya dibandingkan teman-temannya yang aktif tanya jawab pelafalan kata-kata bahasa Inggris. Selama jam pelajaran, Tika juga sedikit berbicara dan cenderung pendiam sampai jam istirahat.

Observasi terakhir pada 9 Agustus 2024, dari jam 08.00 WIB peneliti mencari siswa berkebutuhan khusus bernama Aidil di kelas 9.2. Namun peneliti

tidak menemukan Aidil di kelas dan diberitahukan teman-temannya Aidil berada di kantin diluar gerbang sekolah. Saat ditemui, Aidil terlihat sedang merokok dan duduk di belakang kantin agar tak terlihat oleh guru.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2016:137). Dalam pelaksanaannya, wawancara mendalam tidak terstruktur seperti wawancara formal. Tujuan dari wawancara mendalam ini adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber dengan mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan mewawancarai pelaksana pendidikan inklusi yang berada di SMP Negeri 14 Padang yaitu 2 orang Wakil Kepala Sekolah, 5 orang guru mata pelajaran dan 3 orang siswa berkebutuhan khusus.

Pertama wawancara dilakukan kepada informan pelaku yang merupakan guru mata pelajaran pada tanggal 31 Juli 2024 dengan mewawancarai dua orang guru mata pelajaran yang pernah mengajar siswa berkebutuhan khusus lalu dilanjutkan pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan mewawancarai 3 orang guru mata pelajaran. Wawancara dilakukan seluruhnya di ruang guru di meja guru masing-masing.

Kedua, peneliti mewawancarai informan pelaku yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan bidang kurikulum. Wawancara dilakukan beberapa kali pertemuan dalam periode waktu dari bulan Agustus hingga September. Proses

wawancara sulit dilakukan dalam satu waktu karena jadwal guru yang bentrok dengan jadwal mengajar dikelas dan jadwal kegiatan dinas keluar. Untuk mengakali terbatasnya waktu wawancara, peneliti juga melakukan proses wawancara dengan via *Whatsapp*.

Yang terakhir wawancara dengan siswa siswi berkebutuhan khusus dilakukan pada hari dan waktu yang berbeda tiap orangnya. Wawancara dilakukan dengan menemui siswa berkebutuhan khusus yang dipanggil oleh guru BK. Wawancara dilakukan di tempat yang berbeda-beda seperti di depan kelas dan ruang guru. Selama wawancara, siswa berkebutuhan khusus bernama Aidil dilakukan pendampingan selama proses wawancara karena sulit untuk berbicara dan harus perlahan untuk berbicara dengan Aidil.

Penelitian dilakukan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Minang karena beberapa informan lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Minang seperti siswa siswi berkebutuhan khusus. Pada saat wawancara peneliti menggunakan cara-cara yang beragam seperti memberikan hadiah untuk siswa siswi berkebutuhan khusus agar nyaman dan leluasa bercerita kepada peneliti tentang keadaan yang dirasakannya.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, observasi dan wawancara mendalam oleh peneliti akan diperkuat dengan dokumen dan literatur yang sejalan dengan penelitian ini.

Dokumen dan literatur yang digunakan berupa peraturan-peraturan mengenai kebijakan pendidikan inklusif.

Dokumen yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah data siswa inklusi se Kota Padang yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Lalu dokumen lainnya seperti struktur organisasi SMP Negeri 14 Padang dan data nama siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 14 Padang peneliti dapatkan dari Tata Usaha SMP Negeri 14 Padang.

### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian merujuk pada satuan tertentu yang diperhitungkan untuk subjek penelitian. Unit analisis terkait dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Pada penelitian ini peneliti menetapkan unit analisis pada level kelompok yaitu SMP Negeri 14 Padang.

### **1.6.6 Analisis Data**

Tahap analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data. Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2016:175). Berdasarkan penjelasan dalam buku Metode Penelitian Kualitatif Afrizal, penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data penelitian kualitatif menjadi tiga bagian, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **1.6.7 Definisi Operasional Konsep**

1. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Sekolah Inklusi merupakan implementasi dari bentuk pendidikan inklusi yang menjadi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
3. Peserta didik berkebutuhan khusus merupakan sebutan untuk anak berkebutuhan khusus yang mengikuti proses pembelajaran di sekolah inklusi reguler.

### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian, dia merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan (Afrizal, 2016). Berdasarkan judul dan tujuan penelitian ini, lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 14 Padang. SMP Negeri 14 Padang terletak di Jl. Cupak Tengah, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

SMP Negeri 14 Padang merupakan sekolah inklusi yang terus mengalami perkembangan dalam mengadaptasi pendidikan inklusi sebagai sistem sekolah. Menurut data jumlah siswa inklusi di Kota Padang pada tahun ajaran 2023/2024 dari UPTD LDPI Kota Padang, SMP Negeri 14 memiliki jumlah siswa inklusi terbanyak diantara SMP inklusi lainnya di Kota Padang. Oleh karena itu peneliti memilih SMP Negeri 14 Padang menjadi lokasi penelitian.

### 1.6.9 Jadwal Penelitian

Peneliti ini dilakukan selama 7 bulan yang terhitung dari bulan April 2024 hingga Oktober 2024. Untuk lebih jelasnya, proses kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Tahun 2024						
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1.	Penyusunan Instrumen Penelitian		■					
2.	Pengumpulan Data		■	■	■	■		
3.	Analisis Data			■	■	■		
4.	Membuat Laporan Naskah Skripsi			■	■	■	■	
5.	Bimbingan dan Revisi			■	■	■	■	
6.	Ujian Skripsi							■

